

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA

Nomor : Putussibau,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
 Konstruksi (IUJK) Nasional

Kepada Yth.
 Bupati Kapuas Hulu
 di –
 Putussibau

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

| No. | Klasifikasi | | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | |
|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | Nomor Kode | Sub Klasifikasi | | Tahun | Nilai (Rupiah) |
| | | | | | |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT/CV
 Penanggung Jawab Badan Usaha,

(Nama jelas)

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :
tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Penutupan
Badan Usaha Jasa Konstruksi

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
di –
Putussibau

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Instansi Penerbit IUJK,

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja di Jakarta;
2. Direktur (Nama Badan Usaha) di

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : Putussibau,.....
Lampiran : () berkas

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim
Pembina Jasa Konstruksi),

Ttd

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut:

Jumlah digit:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
 Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
 Digit 6 : Jenis usaha diisi
 1 = Jasa Perencanaan
 2 = Jasa Pelaksanaan
 3 = Jasa Pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya
 5 = Gabungan dari Nomor 1 dan Nomor 3
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
 Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

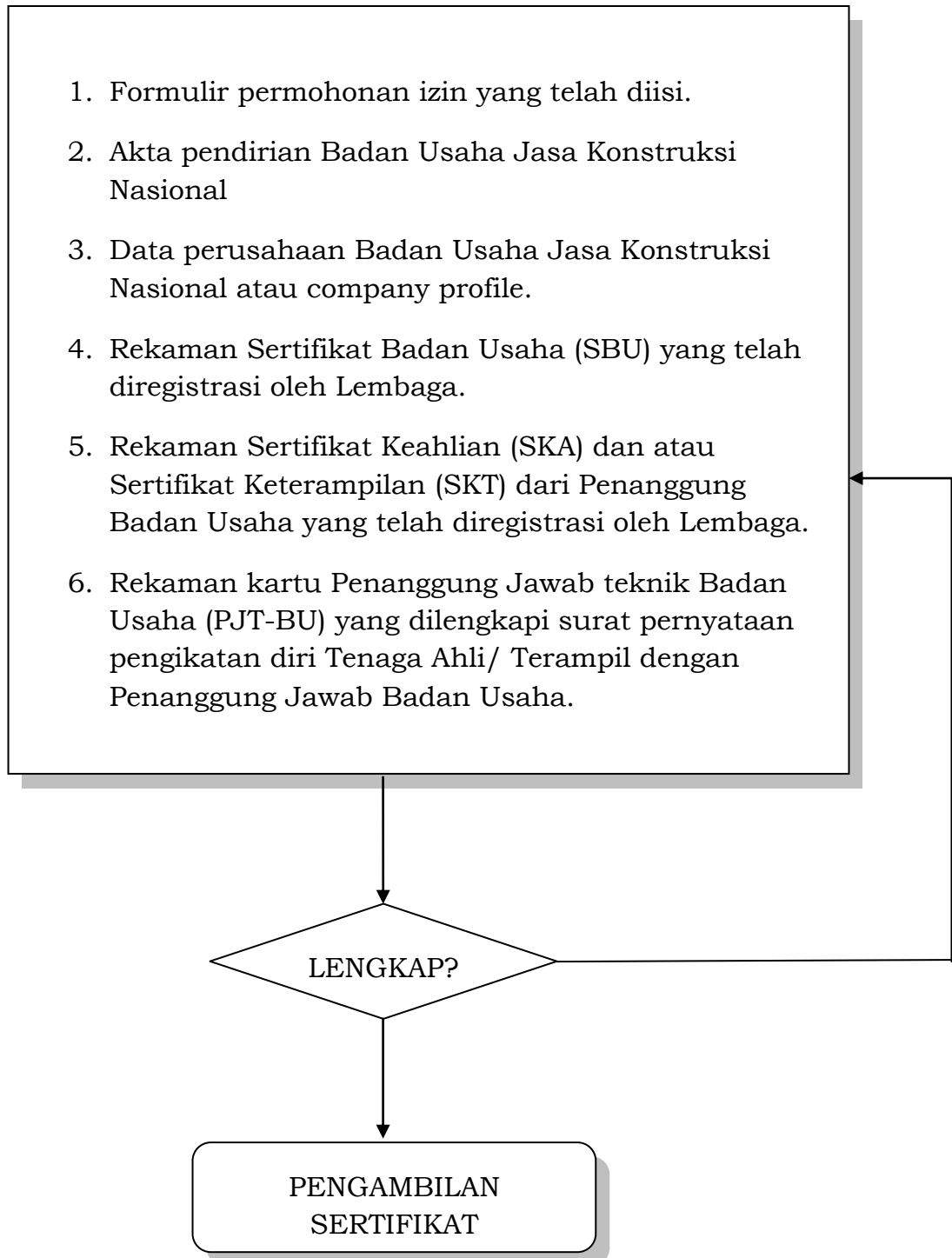
Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah:

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465
6. Kode Badan Usaha : 1-3-372-2-00811-809465

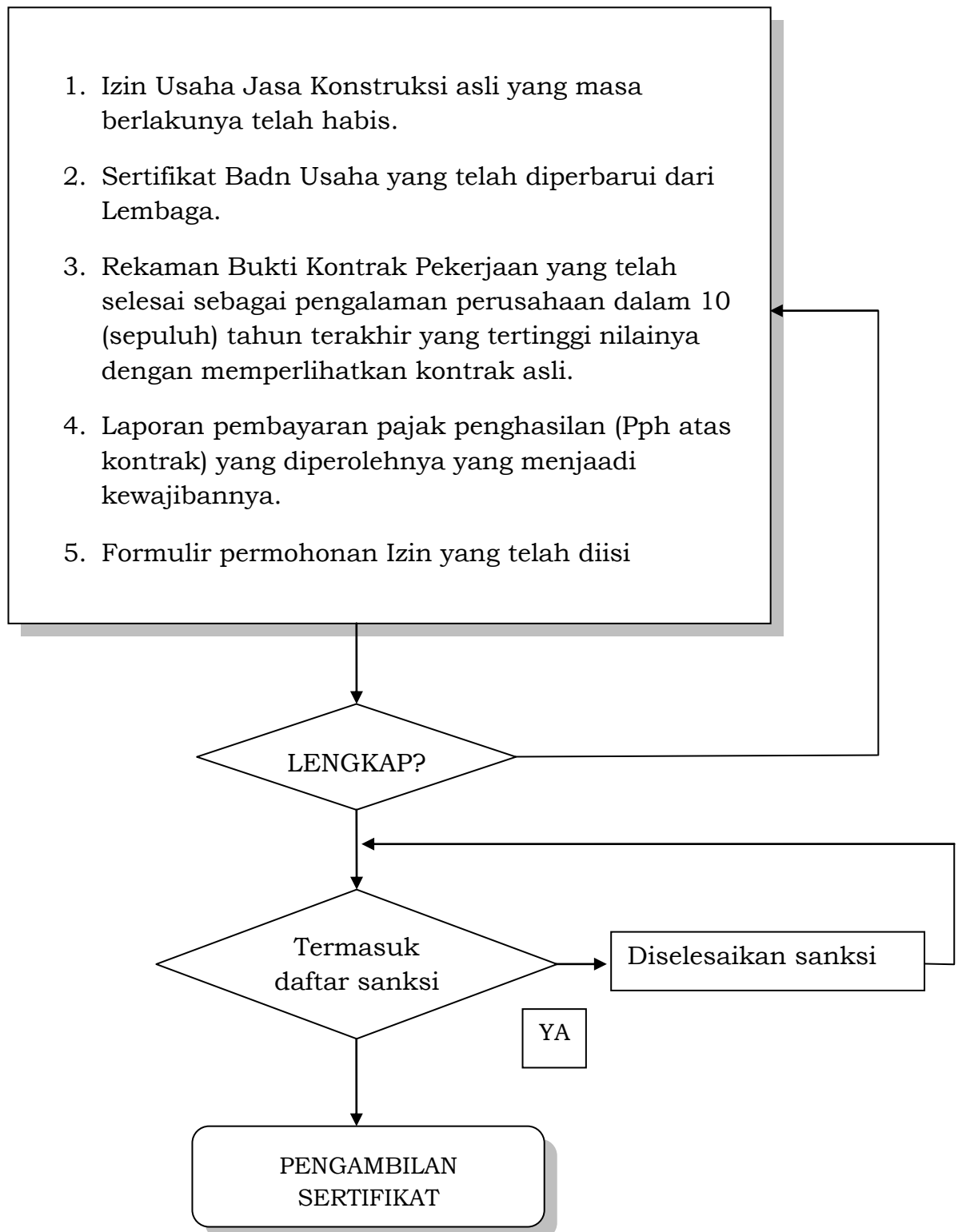
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
A. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK IZIN BARU



B. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IJIN



C. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

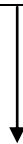
1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

2. Untuk mengganti dat direksi/pengurus baru
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru;
 - c. Curriculum Vitae dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

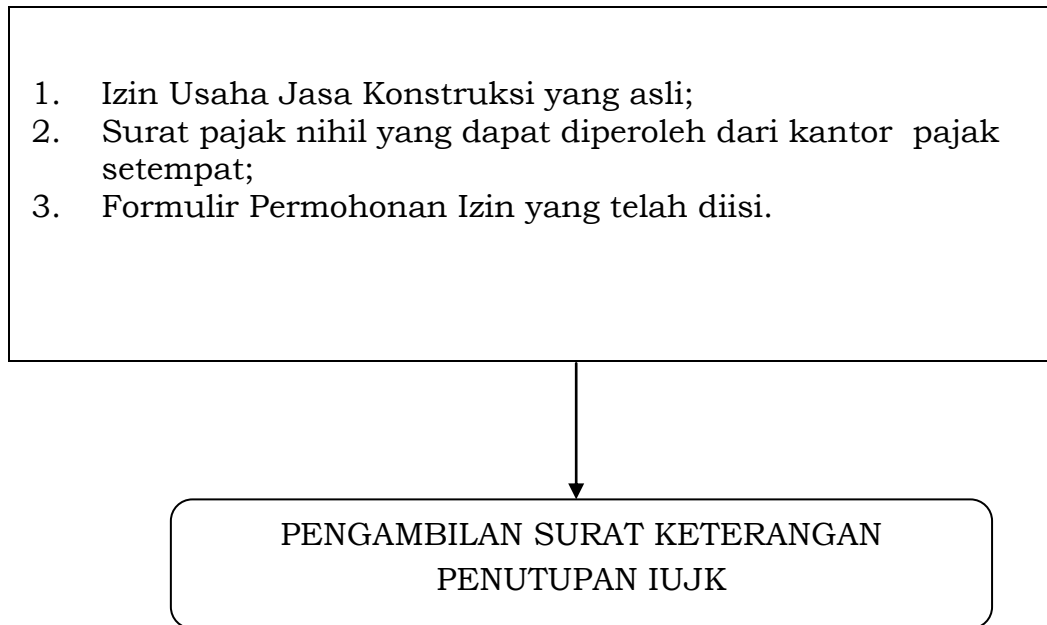
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

5. Untuk mengganti Klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - c. Furmulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

D. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PERUBAHAN DATA



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR